



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI I

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PAULUS BUDI KARTIKO**
2. Jabatan : **KEPALA DIVISI OPERASI I**
3. NHK : **207121**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.272.488.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/99 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.475.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 614.488.000
5. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 783.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/274 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.050.000.000**

1. MOBIL, MAZDA CX-5 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, BMW X-1 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	280.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.049.543.084
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.370.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.022.031.084
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.022.031.084

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.